

NO	JENIS LAYANAN	DASAR HUKUM
1.	Pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
2.	Pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II)	2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3.	Pendaftaran Kendaraan Bermotor Warisan dan/ atau Hibah	3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4.	Pendaftaran Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor Antar Samsat	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.	Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak/ Hilang	5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas penerimaan Negara Bukan Pajak
6.	Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Alamat	6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
7.	Pendaftaran Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk	7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
8.	Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Nomor Polisi	8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
9.	Pengesahan STNK Setiap Tahun	9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan;
10.	Perpanjangan STNK 5 Tahun	10. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor:SKEP/06/X/1999,Nomor:973-1228,Nomor:SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan;
11.	Pendaftaran Ganti Warna Kendaraan Bermotor	11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12.	Pendaftaran Kendaraan Bermotor Rubah Sifat	12.Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
13.	Pendaftaran Ganti Nama Kendaraan Bermotor	13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaann Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14.	Mutasi Keluar Daerah	
15.	Mutasi Masuk Antar Daerah	
16.	Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Mesin	
17.	Pajak Air Permukaan	

		<p>14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2017 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan dan Tata Cara Pembayaran, Penagihan dan Penyetoran Pajak Air Permukaan</p> <p>15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemungutan Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali;</p> <p>16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penghitungan Pengenaan Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor;</p> <p>17. Surat Ederan Gubernur Bali Nomor 119/1718/Dispenda, tanggal 6 April 2011 tentang Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);</p> <p>18. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali Nomor 973/107/Dispenda, tanggal 3 Oktober 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali Nomor 973/1072/Dispenda Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan di Provinsi Bali;</p>
--	--	--